

Analisis Signifikansi Keterkaitan Geopolitik dalam Pelaksanaan Diplomasi Preventif Indonesia pada Kasus Laut Cina Selatan

Michelle Nagakanya Putrika Tandy¹, Elbert Gerardo Chen², Alana Maria³, Cut Hasya Arrumaisha⁴,
Vanessa Eustacia Jackson⁵, Brigitta Valerie⁶

¹Faculty of Social Political Sciences, Universitas Katolik Parahyangan, Indonesia, michelle@nagakanya.com

²Faculty of Social Political Sciences, Universitas Katolik Parahyangan, Indonesia,
gerardo.elbert2001@gmail.com

³ Faculty of Social Political Sciences, Universitas Katolik Parahyangan, Indonesia,
alanamariaromulo@gmail.com

⁴Faculty of Social Political Sciences, Universitas Katolik Parahyangan, Indonesia,
hasyaarrumaisha.hasya@gmail.com

⁵ Faculty of Social Political Sciences, Universitas Katolik Parahyangan, Indonesia,
6091901237@student.unpar.ac.id

⁶ Faculty of Social Political Sciences, Universitas Katolik Parahyangan, Indonesia, valeriebrigitta@gmail.com

Abstract

China's intervention in the South China Sea (SCS) has created tension in South East Asia due to their one sided claim over the SCS. Indonesia, as a South East Asian country, has also been impacted by the tension as the claim threatens Indonesia's security and economic related national interests in the Natuna Regency. Not only that, Indonesia's presence in the SCS escalating conflict is also supported by its position as ASEAN's de facto leader to safeguard the region's maritime security. This research utilizes three concepts to analyze the case; the concept of national interest to analyze Indonesia's motivation, preventive diplomacy concept to overlook Indonesia's attempt in succeeding three frameworks namely, ASEAN Outlook on Indo-Pacific (AOIP), Belt and Road Initiative (BRI), and Regional Comprehensive Economic Partnership (RCEP) and lastly, geopolitical approach in understanding the impact of Indonesia's pro-activeness in the region. Thus, this research argues that Indonesia's Security and economic national interests motivates their proactiveness in these three aforementioned frameworks as a form of preventive diplomacy in an attempt to de-escalate the tension in SCS.

Keywords: *Indonesia, South China Sea, Preventive Diplomacy, National Interest, Geopolitic.*

Abstrak

Kehadiran Tiongkok di Laut Cina Selatan (LCS) menciptakan ketegangan di kawasan Asia Tenggara akibat klaim sepihak terhadap wilayah LCS. Indonesia sebagai salah satu negara di dalamnya ikut terkena dampak dari ketegangan yang terbentuk melihat terancamnya kepentingan Indonesia dalam aspek keamanan dan ekonomi berkaitan dengan Perairan Natuna. Tidak hanya itu, kehadiran Indonesia di tengah-tengah konflik LCS juga didukung dengan posisinya sebagai pemimpin *de facto* ASEAN untuk menjaga keamanan maritim kawasan. Penelitian ini menggunakan konsep kepentingan nasional untuk melihat motivasi Indonesia, konsep diplomasi preventif untuk melihat usaha Indonesia dalam menyukseskan tiga kerangka kerja sama yaitu *ASEAN Outlook on Indo-Pacific* (AOIP), *Belt and Road Initiative* (BRI), dan juga *Regional Comprehensive Economic Partnership* (RCEP) dan pendekatan geopolitik dalam melihat implikasinya terhadap kawasan. Maka, penelitian ini berargumen bahwa kepentingan Indonesia dalam aspek keamanan dan ekonomi mendorong keikutsertaannya dalam tiga kerjasama sekaligus sebagai bentuk diplomasi preventif dalam meredam tensi di LCS.

Kata Kunci: Indonesia, Laut Cina Selatan, Diplomasi Preventif, Kepentingan Nasional, Geopolitik.

Pendahuluan

Indonesia merupakan sebuah negara kepulauan terluas di Asia Tenggara yang memiliki luas perairan mencapai 3.166.163 km². Luasnya wilayah perairan ini membuat Indonesia mendapatkan

keuntungan secara geopolitik dengan memiliki 4 *Sea Line Of Communication* (SLOC).¹ Walaupun menguntungkan, namun luasnya perairan Indonesia juga memunculkan ancaman bagi kedaulatan Indonesia seperti pada Konflik Laut Cina Selatan (LCS). Letak Natuna dan LCS yang berdekatan secara geografis meningkatkan keterlibatan Indonesia dalam isu regional ini. Bagi Indonesia, secara geopolitik konflik ini menjadi penting karena posisi Natuna yang strategis sebagai bagian integral dari Indonesia.

Konflik ini pada dasarnya terjadi diakibatkan sikap sepihak Tiongkok dimana ia beranggapan bahwa wilayah perairan Natuna merupakan wilayah miliknya berdasarkan sejarah yang dimiliki dengan mengajukan klaim “*Nine Dash Line*” terhadap Sekretaris Jenderal PBB. Namun klaim akan teritori tersebut bertumpang tindih dengan wilayah ZEE Indonesia di perairan Natuna dimana Indonesia bertindak dengan mengirimkan *note verbale* kepada Sekretaris Jenderal PBB.² Walaupun demikian, Tiongkok mengabaikan hal tersebut terbukti dengan adanya insiden-insiden mengenai kapal nelayan dan patroli milik Tiongkok yang memasuki wilayah perairan Indonesia.

Masuknya kapal Tiongkok di perairan Indonesia harus menjadi perhatian khusus karena sudah mengancam kepentingan Indonesia. Kurangnya sistem pertahanan militer yang dimiliki membuat Indonesia berada dalam posisi yang rugi. Untuk saat ini sebenarnya Indonesia sendiri memang sudah memiliki program pertahanan yaitu Kekuatan Pokok Minimum atau *Minimum Essential Force* (MEF) yang dibentuk untuk mengembangkan dan modernisasi kekuatan pertahanan, tetapi hal ini masih menghadapi tantangan dengan belum tercapainya target Indonesia untuk memenuhi MEF. Hal tersebut menjadi salah satu titik kelemahan Indonesia dalam mencapai pertahanan yang efektif.³

Tidak hanya itu, adanya konflik mengenai batas maritim di LCS menyebabkan munculnya potensi ancaman terhadap keamanan maritim di Asia Tenggara. Hal ini disebabkan oleh kekayaan sumber daya alam yang berlimpah seperti mineral, gas, dan minyak yang terdapat di LCS.⁴ Tidak dapat dipungkiri, hal ini menyebabkan keterlibatan negara-negara yang terkait dengan konflik LCS tidak dapat dihindari apabila dilihat dari pendekatan geopolitik. Maka dari itu, kehadiran Indonesia dalam konflik LCS untuk turut serta menjaga keamanan maritim sudah tidak dapat dipungkiri lagi, ditambah dengan posisinya sebagai pemimpin *de facto* ASEAN.

Keterlibatan Indonesia pada awalnya untuk menyelesaikan konflik ini secara damai. Hal ini dikarenakan Indonesia ingin mewujudkan negaranya sebagai poros maritim dunia dengan mengedepankan kedaulatan maritim.⁵ Namun, tindakan ini menciptakan ketidaksetujuan dari Tiongkok karena peran Indonesia dianggap hanya untuk memenuhi kepentingan nasionalnya. Dikarenakan berada dalam kawasan yang sama serta kekuatan militer yang lebih kecil dibandingkan

¹ Kementerian Pertahanan Republik Indonesia, “Kementerian Pertahanan Republik Indonesia,” www.kemhan.go.id, diakses pada 4 Juli, 2021, <https://www.kemhan.go.id/2012/05/10/reformasi-pertahanan-dan-kapabilitas-pertahanan-negara-yang-murah-meriah.html>.

² Aaron Connelly, “Indonesia in the South China Sea: Going It Alone,” 2016, h. 3, <https://www.lowyinstitute.org/sites/default/files/documents/Connelly%20Indonesia%20in%20the%20South%20China%20Sea.pdf>.

³ Ervita. L. Zahara and Arjun Rizky M.N, “Analisis Ringkas Cepat Anggaran Pertahanan Indonesia Pemenuhan Minimum Essential Force” (April 2021), h.1

⁴ Silvia Dian Anggraini, Indra Kusumawardhana, and Iqbal Ramadhan, “The Implication of Indonesia’s IUU Fishing Policy in Natuna Territorial Waters towards South China Sea Geopolitics,” *Jurnal Hubungan Internasional* 7, no. 2 (2018), <https://doi.org/10.18196/hi.72130>.

⁵ *Ibid.*

Tiongkok membuat Indonesia harus berhati-hati dalam menyikapi konflik ini. Maka dari itu, Indonesia menggunakan diplomasi preventif dalam upaya mempertahankan sekaligus mencapai kepentingannya. Hal ini dilakukan guna meredam tensi terhadap Tiongkok yang terbentuk akibat konflik LCS.

Sebelumnya, penggunaan diplomasi dalam konflik LCS oleh Indonesia sudah sempat dibahas dalam jurnal yang berjudul "*Strategic hedging in Indonesia's defense diplomacy*" ditulis oleh Iis Gindarsah yang memiliki argumen utama bahwa Indonesia memiliki 2 agenda dalam kebijakannya di konflik LCS yaitu membangun pendekatan hubungan melalui ASEAN namun di lain sisi Indonesia juga meningkatkan strategi pertahanan untuk meminimalisir dampak dari kondisi geopolitik yang penuh ketidakamanan.⁶ Lalu, kebanyakan jurnal lainnya membahas mengenai peran ASEAN seperti jurnal "*Preventive Diplomacy in Southeast Asia: Redefining the ASEAN Way*" karya Jim Della-Giacoma⁷ dan "*The Rise of China's Impact on ASEAN Conference Diplomacy: A Study of Conflict in the South China Sea*" karya Koichi Sato⁸ mengenai peran ASEAN dalam mewedahi negara-negara anggotanya untuk meredam tensi di LCS melalui diplomasi terhadap Tiongkok. Tetapi, masih belum banyak yang membicarakan mengenai usaha diplomasi preventif melalui kerangka kerjasama ekonomi serta pertahanan secara multilateral dan bilateral.

Melalui penelitian ini, memberikan pandangan lain dalam membahas peran Indonesia di konflik LCS sebagai salah satu pemimpin di ASEAN. Melihat pada konflik yang terus berkelanjutan tanpa terlihat ujungnya, diakui memang permasalahan ini tidak bisa diselesaikan jika kedua belah pihak tidak mencapai konsensus. Maka, dibandingkan melihat pada peningkatan kekuatan pertahanan, penelitian ini ditunjukkan untuk melihat peran dari kepentingan Indonesia dalam mengambil tindakan diplomasi preventif melalui kerangka kerjasama yang dipilih dan keuntungannya secara geopolitik.

Untuk itu, penelitian ini ditujukan untuk menjawab **Bagaimana kepentingan Indonesia berperan dalam menciptakan hubungan geopolitik yang mendukung diplomasi preventif untuk menghadapi konflik LCS?** mengingat bahwa Tiongkok memiliki kapabilitas kekuatan yang jauh dibandingkan dengan Indonesia. Untuk menjawab hal tersebut, penelitian ini berargumen bahwa menjaga teritori serta kepentingan ekonomi Indonesia berperan penting dalam mendorong keikutsertaan Indonesia dalam 3 kerangka kerja sama yang dipilih yaitu *ASEAN Outlook on Indo-Pacific* (AOIP), *Belt Road Initiative* (BRI), dan *Regional Comprehensive Economic Partnership* (RCEP) dimana kerjasama ini digunakan Indonesia untuk meredam tensi sekaligus mencapai kepentingannya.

Teori dan Konsep

Pada dinamika politik internasional, kepentingan nasional dilihat melalui dua pandangan yang berbeda. Pertama, kepentingan nasional dilihat sebagai sebuah instrumen yang digunakan oleh negara-negara untuk menjadi landasan perilaku politik mereka dalam dunia internasional. Perilaku negara ini yang kemudian menentukan posisi mereka antara mendukung dan melindungi kebijakan

⁶ Iis Gindarsah, "Strategic Hedging in Indonesia's Defense Diplomacy," *Defense & Security Analysis* 32, no. 4 (27 September, 2016): 336–53, <https://doi.org/10.1080/14751798.2016.1233695>.

⁷ Jim Della-Giacoma, "Preventive Diplomacy in Southeast Asia: Redefining the ASEAN Way," JSTOR, 2011, <http://www.jstor.com/stable/resrep09602.6>.

⁸ Koichi Sato, "The Rise of China's Impact on ASEAN Conference Diplomacy: A Study of Conflict in the South China Sea," *Journal of Contemporary East Asia Studies* 2, no. 2 (Januari 2013): 95–110, <https://doi.org/10.1080/24761028.2013.11869064>.

negara lain atau membuat kebijakannya sendiri. Sedangkan pandangan yang kedua adalah kepentingan nasional yang digunakan sebagai alat analisis untuk menjelaskan, mendeskripsikan dan menilai sebuah kebijakan luar negeri negara. Kepentingan nasional kemudian digunakan untuk menjadi tolak ukur apakah kebijakan atau tindakan yang diambil oleh negara sudah cukup baik dan efektif atau belum.⁹

Rosenau mengatakan bahwa setiap ahli memiliki pandangan sendiri terhadap konsep national interest namun secara garis besar terbagi menjadi dua. Kelompok pertama yang dinamakan 'objectivist' melihat bahwa kepentingan sebuah negara terbentuk atas realita objektif yang ada dan dengan menjelaskan realita tersebut maka kita bisa menggunakan konsep kepentingan nasional untuk mengevaluasi kebijakan untuk mencapai kepentingan yang ingin dicapai tersebut. Kelompok kedua termasuk pada para ahli yang lebih menggunakan pendekatan 'critical'. Rosenau salah satunya, melihat bahwa kepentingan nasional hanyalah sebuah cara untuk menjelaskan ke arah mana sebuah kebijakan luar negeri akan arahkan.¹⁰ Pandangan Rosenau ini kemudian didukung oleh Hedley Bull yang mengatakan bahwa untuk sebuah kepentingan nasional bisa terlihat diperlukan penjelasan terhadap tujuan akhir dari sebuah kepentingan. Hal ini kemudian bisa menunjukkan maksud politik yang membentuk tujuan akhir dari sebuah kebijakan. Kepentingan nasional merupakan sebuah rencana untuk mencapai tujuan akhir yang sudah disepakati, yang bisa dibedakan melalui kebijakan berdasarkan kepentingan sektor, kepentingan aliansi dan organisasi internasional maupun berdasarkan kebijakan yang sudah ada.¹¹ Dalam mengkaji kepentingan nasional, kita bisa menggunakannya sebagai alat deskriptif maupun evaluatif yang terbagi kepada dua pandangan, konvensional dan kritis.

Menurut Scott Burchill dalam *The National Interest in International Relations Theory* terdapat tiga asumsi utama terhadap sebuah kepentingan nasional yang disetujui oleh para ahli. Pertama adalah bahwa walaupun setiap negara memiliki perbedaan yang mencolok seperti dari segi ideologi, mereka tetap memiliki kepentingan utama yang sama. Diantaranya adalah kepentingan untuk menjaga kedaulatan negara dan integritas wilayah. Secara garis besar, kepentingan semua negara adalah untuk bisa melaksanakan aktivitas dan kebijakan mereka tanpa adanya campur tangan pihak eksternal dan tidak berdasarkan kepentingan negara lain. Kedua, terdapat beberapa kepentingan nasional yang dimiliki oleh sebuah negara bersifat permanen. kepentingan tersebut tidak akan berubah atau tersingkirkan atau terpengaruh oleh perubahan dalam pemerintahan domestik. Dalam sebuah negara terdapat beberapa aset nasional dari segi strategis seperti jalur maritim dan akses pelabuhan maupun segi ekonomis seperti sumber daya alam dan mineral yang diminati oleh pihak- pihak eksternal maka dari itu negara memiliki kepentingan utama yang bersifat permanen untuk bisa menjaga aset-aset tersebut untuk domestik. Terakhir adalah bahwa pemerintah merupakan aktor utama yang menjalankan dan menunjukkan kepentingan nasionalnya. Sebagai aktor yang memiliki hak

⁹ J. N. Rosenau, "National Interest," in *International Encyclopedia of the Social Sciences*, ed. David L. Sills (London: Collier Macmillan, 1964), 34–40.

¹⁰ Scott Burchill, *The National Interest in International Relations Theory* (Houndmills, Basingstoke, Hampshire ; New York: Palgrave Macmillan, 2005), 29-30.

¹¹ Hedley Bull, *The Anarchial Society : A Study of Order in World Politics* (London: Macmillan Press, 1979). h. 6

berdaulat dan kedudukan untuk mengatur masyarakatnya, mereka bisa mewakili suara domestiknya di kancah internasional.¹²

Secara garis besar konsep “National Interest” merupakan sebuah alat evaluatif maupun deskriptif terhadap tujuan yang ingin dicapai oleh sebuah negara. Secara evaluatif, konsep tersebut bisa digunakan untuk melihat apakah sebuah kebijakan negara sudah mencerminkan tujuan yang ingin dicapai mereka dan apakah kebijakan tersebut benar-benar mencerminkan kepentingan nasionalnya. Sedangkan dari segi deskriptif, kepentingan nasional bisa digunakan untuk menjelaskan maksud dari dibuatnya sebuah kebijakan. Konsep tersebut juga dipakai sebagai landasan terbentuknya sebuah kebijakan. Dalam menganalisa kasus diplomasi preventif oleh Indonesia penulis akan menggunakan pandangan kepentingan nasional dari sudut pandang kritikal. Penulis akan melihat kepentingan nasional yang dimiliki oleh Indonesia di Laut Cina Selatan yang menjadi alat untuk menciptakan arah kebijakan diplomasi.

Hubungan antara geografi, strategi, dan politik dapat memberikan pengaruh yang signifikan bagi negara. Menurut Grygiel, geopolitik berfokus pada distribusi kekuatan baru, perubahan strategi pada sebuah wilayah, dan perubahan pada wilayah atau zona yang berpotensi konflik.¹³ Dalam sistem internasional, geopolitik dapat menjadi variabel untuk menjelaskan perubahan yang terjadi pada distribusi geografis, ekonomi, jasa, dan sumber daya alam dan dapat mempengaruhi pembentukan geostrategi sebuah negara. Persaingan geopolitik dapat menentukan perekonomian global dan berubahnya posisi negara dalam persaingan kekuasaan serta dapat berpengaruh terhadap berubahnya aturan persaingan global. Ini menunjukkan bahwa ketika suatu negara mengejar kekuasaan, maka sama saja dengan mengejar keuntungan untuk meningkatkan perekonomian negara tersebut.¹⁴ Hal tersebut menambah nilai terhadap kebijakan territorial, karena terdapat implikasi yang sangat penting. Maka dari itu, seluruh negara dihimbau untuk meningkatkan pengaruh dan kekuasaan untuk mengatur teritori atau geostrategi. Geostrategi dapat menjadi dasar acuan atau pemikiran dari sebuah negara yang berusaha memproyeksikan kekuatan militer untuk diarahkan kepada kegiatan diplomasi.

Berkaitan dengan hal tersebut, penelitian ini akan menggunakan konsep diplomasi preventif yang pertama kali dicetuskan oleh Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) yaitu Boutros Ghali yang mengatakan diplomasi preventif adalah aksi yang dilakukan untuk menghindari perselisihan terjadi antara pihak-pihak yang terlibat, menghindari perselisihan berubah menjadi konflik, dan meminimalisir dampak dari konflik jika hal tersebut terjadi.¹⁵ Menurut Emmers & Tan, diplomasi preventif dilaksanakan sebelum konflik pecah dan diimplementasikan dalam tiga tahapan tergantung dengan situasi yang dihadapi. Pertama, diimplementasikan langsung pada sumber dari konflik ; kedua, berfokus untuk menghindari perselisihan berubah menjadi tindak kekerasan; ketiga, tindak kekerasan yang meluas dan berpotensi terhadap terjadinya perang.¹⁶ Maka dari itu, preventif

¹² Scott Burchill, *The National Interest in International Relations Theory* (Houndmills, Basingstoke, Hampshire ; New York: Palgrave Macmillan, 2005),26-28.

¹³ Randall L. Schweller, “Great Powers and Geopolitical Change. By Jakub J. Grygiel. Baltimore: The Johns Hopkins University Press, 2006. 258p. \$47.00.,” *Perspectives on Politics* 7, no. 1 (12 Februari, 2009): 224–25, <https://doi.org/10.1017/s1537592709090689>.

¹⁴World Economic Forum, “Global Agenda Councils Geo-Economics Seven Challenges to Globalization,” 2015, http://www3.weforum.org/docs/WEF_Geo-economics_7_Challenges_Globalization_2015_report.pdf.

¹⁵ Takeshi Yuzawa, “The Evolution of Preventive Diplomacy in the ASEAN Regional Forum: Problems and Prospects,” *Asian Survey* 46, no. 5 (September 2006): 787, <https://doi.org/10.1525/as.2006.46.5.785>.

¹⁶Ralf Emmers, See Seng Tan, *The ASEAN Regional Forum and Preventive Diplomacy : A Failure in Practice* (Singapore: S. Rajaratnam School Of International Studies, Nanyang Technological University, 2009).h. 159, 5

diplomasi dapat menjadi mekanisme dalam resolusi konflik dikarenakan diplomasi ini secara khusus membahas mengenai aksi diplomasi yang dipergunakan semaksimal mungkin untuk menghindari pecahnya konflik.¹⁷

Analisis

a. Identifikasi Kepentingan Nasional Indonesia dalam Konflik LCS sebagai Pembentuk Keterkaitan Geopolitik di Regional ASEAN

Seperti yang telah dijabarkan dalam kerangka teori, pertama-tama kepentingan nasional sebuah negara dapat dilihat sebagai landasan perilaku politik negara-negara dalam dinamika internasional.¹⁸ Berdasarkan pernyataan tersebut dapat dikatakan bahwa sebuah negara memiliki kepentingan nasional yang esensial dan senantiasa menjadi landasan dalam perilakunya dalam dinamika politik internasional seperti untuk Indonesia adalah prinsip politik luar negeri bebas aktif. Dalam Penjelasan UU No. 37 tahun 1999 Pasal 3 tentang Hubungan Luar Negeri tertera pengertian dari “bebas aktif” bukanlah bersikap secara netral tetapi berpartisipasi secara aktif di dalam dinamika politik luar negeri dengan bebas menentukan sikap serta membuat kebijakan untuk menyelesaikan konflik internasional tanpa ada ikatan dengan salah satu kekuatan dunia.¹⁹ Secara eksplisit dalam UU tersebut dikatakan bahwa prinsip politik luar negeri bebas aktif digunakan untuk kepentingan nasional Indonesia dalam menjalin hubungan luar negeri.²⁰ Hal ini berarti segala perilaku Indonesia dan kepentingan nasional yang direpresentasikannya harus berlandaskan dan sejalan dari prinsip ini termasuk dalam menghadapi eskalasi konflik LCS ini.

Kemudian Rosenau juga berargumen bahwa kepentingan nasional dapat dimanfaatkan untuk menganalisis kebijakan luar negeri negara dan perilaku politiknya di kancah internasional pertama-tama secara objektif.²¹ Untuk menganalisis perilaku politik Indonesia dalam mengatasi eskalasi konflik LCS ini menurut objektivis perlu dilihat terlebih dahulu bagaimana relevansi kepentingan nasional yang diproyeksikan dengan realita objektif dari kasus tersebut. Sebagaimana telah dijabarkan sebelumnya dalam pendahuluan, fokus problematika dari eskalasi konflik LCS yang dapat diidentifikasi sebagai realita objektif adalah bagaimana upaya Indonesia dalam menjaga dan mempertahankan kedaulatan maritimnya di tengah isu ini.²² Pada Juni 2020 lalu Indonesia menerbitkan nota diplomatik resmi kepada PBB untuk menanggapi pengajuan landas kontinental Malaysia terhadap klaim Tiongkok atas LCS menggunakan *nine dash line* pada tahun 2019. Dalam nota diplomatik tersebut dengan tegas Indonesia menyatakan sikap penolakannya terhadap *nine dash line* dengan menegaskan ketidak terikatan Indonesia kepada

¹⁷ Dag Hammarskjöld, “Preventive Diplomacy: Delivering Results,” *Report of the Secretary-General* (26 Augustus, 2011), <https://www.un.org/undpa/sites/www.un.org.undpa/files/SG%20Report%20on%20Preventive%20Diplomacy.pdf>.

¹⁸ J. N. Rosenau, “National Interest,” in *International Encyclopedia of the Social Sciences*, ed. David L. Sills (London: Collier Macmillan, 1964), 34–40.

¹⁹ Kementerian Keuangan, “Penjelasan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 1999,” jdih.kemenkeu.go.id, n.d., <https://jdih.kemenkeu.go.id/fulltext/1999/37TAHUN1999UUPenjel.htm>.

²⁰ Sekretariat Negara, “Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 1999,” n.d., https://ktln.setneg.go.id/pdf/TA/PP_37_1999.pdf.

²¹ Scott Burchill, *The National Interest in International Relations Theory* (Houndmills, Basingstoke, Hampshire ; New York: Palgrave Macmillan, 2005), 29-30.

²² *Ibid.*

klaim yang tidak sejalan dengan hukum internasional.²³ Penegasan tersebut memperlihatkan bahwa kepentingan nasional Indonesia yang utama dalam konflik LCS adalah untuk menolak tegas dan mencegah munculnya segala klaim yang tidak sah secara hukum internasional, yang mana kepentingan nasional ini sudah relevan dengan realita objektifnya.

Selain itu kepentingan nasional juga dapat digunakan untuk analisis secara kritis dimana kepentingan nasional berperan sebagai rangkaian rencana untuk mencapai tujuan bersama sehingga dapat merefleksikan arah kebijakan luar negeri apakah kepada kepentingan aliansi, organisasi internasional, maupun regional.²⁴ Indonesia memiliki tujuan yang jelas dalam menghadapi eskalasi konflik LCS adalah untuk menyelesaikan konflik ini untuk mempertahankan kedaulatan wilayah maritimnya. Perihal wilayah maritim Indonesia di LCS membuat isu ini tidak bisa terlepas dari pentingnya dinamika geopolitik dikarenakan wilayah maritim Indonesia yang langsung berbatasan dengan negara-negara tetangganya seperti Malaysia, Filipina, dan Vietnam serta fakta bahwa wilayah maritim ini menjadi kedaulatan wilayah yang esensial bagi regional Asia Tenggara. Hal tersebut berarti rencana yang terbentuk melalui perilaku-perilaku politik luar negeri Indonesia untuk menghadapi isu ini mengarah kepada kepentingan regional di Asia Tenggara. Rencana ini tercermin melalui kepentingan nasional Indonesia di ASEAN dalam menghadapi konflik ini secara bertahap ingin pertama menyelesaikan masalah dari dalam regional sendiri dengan mendorong negosiasi dengan negara-negara ASEAN yang berbatasan maritim langsung dengan Indonesia di LCS perihal klaim wilayah yang saling tumpang tindih atas wilayah maritim tersebut menurut hukum internasional sebelum menghadapi tantangan terhadap kedaulatan wilayah maritim regional di LCS dari luar regional.²⁵

Selanjutnya untuk menilik lebih dalam mengenai keterkaitan posibilitas kepentingan nasional Indonesia yang fokusnya terarah kepada kepentingan regional, kasus ini dianalisis dengan asumsi pertama Burchill mengenai kepentingan nasional. Diasumsikan oleh Burchill sekalipun setiap negara memiliki perbedaan tapi pada umumnya memiliki kepentingan utama mendasar yang sama.²⁶ Dalam kasus eskalasi konflik LCS dengan Tiongkok ini negara-negara ASEAN memiliki kepentingan mendasar yang sama untuk menjaga wilayah kedaulatan maritim Asia Tenggara. Kepentingan yang mendasar ini dapat digunakan oleh Indonesia sebagai roda penggerak untuk menuju kepentingan regional yang ditargetkan dan diperkuat karena tindakan Tiongkok di LCS yang secara langsung bersinggungan dan mengancam kedaulatan Malaysia, Filipina, dan Vietnam. Salah satu contohnya adalah operasi pengeboran minyak Tiongkok di wilayah *nine dash line* yang kemudian menjadi kasus antara Tiongkok dengan Vietnam.²⁷ Kesamaan kepentingan ini ditambah dengan Tiongkok yang terlihat seperti musuh bersama dalam

²³ CNN Indonesia, "RI Kirim Nota Verbal Tolak Klaim China Di LCS Ke PBB, 18 Juni 2020, <https://www.cnnindonesia.com/internasional/20200617202138-106-514497/ri-kirim-nota-verbal-tolak-klaim-china-di-lcs-ke-pbb>.

²⁴ Hedley Bull, *The Anarchial Society : A Study of Order in World Politics* (London: Macmillan Press, 1979), 6.

²⁵ Mata Mata Politik Editorial, "Netral Atau Tegas: Mengukur Kepentingan Indonesia Di Laut China Selatan," Berita Dunia Internasional dan Berita Politik Indonesia Terbaru Hari ini, 27 Juni 2020, <https://www.matamatapolitik.com/netral-atau-tegas-mengukur-kepentingan-indonesia-di-laut-china-selatan-analisis/>.

²⁶ Scott Burchill, *The National Interest in International Relations Theory* (Houndmills, Basingstoke, Hampshire ; New York: Palgrave Macmillan, 2005), 26-28.

²⁷ Yuliantino Situmorang, "Tiongkok Hentikan Pengeboran Minyak Di Kawasan Sengketa," beritasatu.com, 16 Juli 2014, <https://www.beritasatu.com/dunia/197030/tiongkok-hentikan-pengeboran-minyak-di-kawasan-sengketa>.

kasus ini membuka kemungkinan bagi negara-negara ASEAN untuk kemudian menjadi lebih berkomitmen dan proaktif untuk terlibat dalam upaya Indonesia mengatasi eskalasi konflik LCS.

Berikutnya Burchill berasumsi bahwa setiap negara memiliki kepentingan yang bersifat permanen dan tidak berubah sekalipun berganti rezim.²⁸ Perlu dipahami konteks besar dari pentingnya LCS bagi Indonesia, Malaysia, Vietnam, Brunei, dan Filipina bahwa sejak berabad-abad yang lalu wilayah maritim ini telah menjadi sumber ekonomi yang esensial baik dari perikanan maupun gas dan mineral yang terdapat di wilayah ini.²⁹ Selain kaya akan sumber daya LCS juga menjadi jalur perdagangan yang ramai dilalui dan menjadi jalur perdagangan yang signifikan bagi sistem perdagangan internasional, sepertiga lalu lintas maritim global terjadi di wilayah maritim ini.³⁰ Produktivitas yang tinggi dan kekayaan sumber daya yang melimpah membuat stabilitas dan keamanan di LCS salah satu prioritas kepentingan politik keamanan yang utama bagi Indonesia, Malaysia, Vietnam, Brunei, dan Filipina selama bertahun-tahun, rezim lepas rezim. Dengan adanya desakan dari eksternal regional Asia Tenggara yang terus berusaha untuk mengklaim wilayah maritim ini dapat menjadi dorongan munculnya kesadaran untuk membangun dan mempertahankan kekuatan serta stabilitas regional ASEAN untuk bersama-sama mempertahankan kedaulatan di LCS.

Terakhir, Burchill mengasumsikan bahwa pemerintah adalah pemeran aktif dan utama dalam pelaksanaan implementasi dan perwujudan kepentingan nasional negara.³¹ Untuk mewujudkan kepentingan nasional Indonesia dalam eskalasi konflik LCS pemerintah Indonesia telah melakukan berbagai upaya baik secara domestik maupun internasional. Secara domestik pemerintah Indonesia mendorong pemenuhan MEF untuk memperkuat militer Indonesia untuk kepentingan menjaga kedaulatan wilayahnya. Mengesampingkan fakta bahwa kekuatan militer Indonesia belum sebanding dengan Tiongkok, kekuatan militer Indonesia berhasil membuat Indonesia berada dalam posisi militer terkuat di ASEAN sehingga dipercaya dan diandalkan oleh negara-negara ASEAN lainnya untuk mempertahankan kedaulatan wilayah regional di LCS.³² Selain itu Indonesia secara konsisten menerapkan politik bebas aktifnya dalam membantu negara-negara ASEAN mengatasi problematika yang mereka alami baik dalam penyelesaian konflik maupun pemberian bantuan selain itu Indonesia dengan vokal mengadvokasikan dorongan untuk terwujudnya stabilitas regional di ASEAN.³³ Oleh karena itu Indonesia menjadi pemimpin *de facto* di ASEAN dan posisi ini dapat dimanfaatkan untuk kemudian mewujudkan kepentingan nasional Indonesia melalui upaya-upaya penyelesaian konflik LCS bersama negara-negara ASEAN lainnya.

²⁸ Scott Burchill, *The National Interest in International Relations Theory* (Houndmills, Basingstoke, Hampshire ; New York: Palgrave Macmillan, 2005), 26-28.

²⁹ Pete Cobus, "Laut China Selatan Konflik Dan Diplomasi Di Laut," Voanews.com, 29 Desember 2016, <https://projects.voanews.com/south-china-sea/indonesian/>.

³⁰ *Ibid.*

³¹ Scott Burchill, *The National Interest in International Relations Theory* (Houndmills, Basingstoke, Hampshire ; New York: Palgrave Macmillan, 2005).

³² Kontan, "Kekuatan Militer ASEAN: Indonesia Nomor 1, Vietnam Peringkat 2," kontan.co.id, 21 Januari 2021, <https://nasional.kontan.co.id/news/kekuatan-militer-asean-indonesia-nomor-1-vietnam-peringkat-2>.

³³ Sekretariat Nasional ASEAN - Indonesia, "Sekretariat Nasional ASEAN – Indonesia," setnas-asean.id, n.d., <http://setnas-asean.id/peranan-indonesia>, diakses pada 1 Juli 2021

b. Upaya Pemenuhan Kepentingan Nasional Indonesia terhadap LCS dengan Keterkaitan Geopolitik

Dalam rangka mewujudkan kepentingan nasionalnya, Indonesia mencetuskan *ASEAN Outlook on Indo-Pacific* (AOIP). Letak LCS yang berada di kawasan Asia Tenggara, membuat ASEAN menjadi salah satu pemeran utama dalam memimpin keamanan untuk tercapainya perdamaian dan stabilitas regional. Maka dari itu, AOIP hadir sebagai bentuk kesepakatan negara-negara ASEAN untuk menghadapi tantangan, termasuk untuk menjaga keamanan LCS.³⁴ AOIP berisi ambisi Indonesia untuk terciptanya kerjasama maritim di negara-negara kawasan Indo-Pasifik. Hal ini dilakukan untuk mencapai kepentingan Indonesia yang berupaya untuk memajukan maritim domestik yang sejalan dengan visi misi Presiden Jokowi untuk menjadikan Indonesia poros maritim dunia. Maka, melalui AOIP ini, posisi geostrategis Indonesia dapat digunakan sebagai kekuatan untuk menyelesaikan tantangan geopolitik yang berpotensi menjadi konflik.³⁵

Konflik LCS juga telah dicegah melalui perjanjian UNCLOS atau *the United Nations Convention on the Law of the Sea*. Menurut UNCLOS pasal 56, wilayah ZEE suatu negara, termasuk ZEE negara pemilik, mempunyai hak untuk memanfaatkan teritorial tersebut untuk kepentingan negaranya³⁶. Oleh sebab itu, Indonesia telah menerapkan apa yang menjadi perjanjian dalam UNCLOS dengan melakukan penangkapan atas kapal Tiongkok yang berada di teritorial Indonesia. Dalam hal ini, kita dapat melihat bahwa Indonesia telah menjalankan hak atas kedaulatannya yang didasari oleh UNCLOS untuk melindungi wilayah ZEE nya dari keberadaan ilegal entitas negara lain. Hal ini sejalan dengan persetujuan dalam AOIP yang menekankan bahwa pentingnya kerja sama dan rasa hormat antar negara untuk terciptanya perdamaian atas kedaulatan teritorial negara.

Dalam rangka mencapai Politik Luar Negeri Indonesia yaitu bebas aktif, Indonesia berupaya untuk mempererat hubungan tidak hanya dengan anggota ASEAN, tapi juga dengan Tiongkok dalam berbagai bidang. Maka dari itu, Indonesia mewujudkan kerja sama untuk kepentingan nasionalnya melalui BRI atau *Belt and Road Initiative*. Indonesia dengan antusias menyambut proyek BRI yang dibiayai dan dibangun oleh Tiongkok. Bantuan keuangan dari Presiden Xi sangat membantu Indonesia dalam mewujudkan tujuan maritimnya.³⁷ Salah satu proyek penting yang dibangun oleh Tiongkok adalah Pembangunan Kereta Cepat Jakarta-Bandung di Pulau Jawa.³⁸ Selain itu pada tahun 2019, Tiongkok telah menyetujui pembangunan Pelabuhan Kuala Tanjung di Sumatera Utara.³⁹ Proyek ini mendapatkan dukungan penuh dari Presiden Jokowi untuk mencapai tujuan maritimnya dengan cara memperkuat jalur transportasi baik di darat maupun laut. Dengan hubungan diplomatik dan ekonomi yang baik, pembangunan

³⁴ "Final, ASEAN Outlook on the Indo-Pacific," ASEAN, 28 November, 2020, https://asean.org/storage/2019/06/ASEAN-Outlook-on-the-Indo-Pacific_FINAL_22062019.pdf, 3.

³⁵ *Ibid.*

³⁶ "United Nations Convention on the Law of the Sea," n.d., h. 40, https://www.un.org/Depts/los/convention_agreements/texts/unclos/unclos_e.pdf.

³⁷ Lai, Hongyi. 2019. "Indonesia: The Belt and Road Initiative and Relations with China." *Asia Dialogue*. 4 Oktober, 2019. <https://theasiadialogue.com/2019/10/04/belt-and-road-initiative-in-indonesia-and-relations-with-china/>.

³⁸ Qiaoyi, Li. 2019. "Indonesian High-Speed Rail Serves as BRI Enlightener - Global Times." *Www.globaltimes.cn*. 25 Juli, 2019. <https://www.globaltimes.cn/content/1159232.shtml>.

³⁹ Biro Komunikasi. 2019. "Menko Luhut: Indonesia Alokasikan Empat Koridor Pada Proyek BRI." *Maritim.go.id*. 25 April, 2019. <https://maritim.go.id/menko-luhut-indonesia-alokasikan-empat-koridor-pada-proyek-bri/>.

infrastruktur Indonesia dapat menarik para investor untuk lebih mudah menjangkau daerah-daerah yang dituju.

Kemajuan yang nyata terhadap infrastruktur Indonesia dapat dilihat melalui pembiayaan multilateral yaitu *Asian Infrastructure Investment Bank* (AIIB). Pembiayaan ini telah dijelaskan dalam beberapa forum ASEAN dan juga APEC. Indonesia mendukung berjalannya AIIB ini dengan tujuan untuk memperkuat kerja sama bilateral antara Indonesia dengan Tiongkok.⁴⁰ Selain itu, AIIB juga menjadi sumber pendanaan alternatif yang sangat menguntungkan Indonesia dalam proses pembangunan infrastruktur. AIIB memiliki visi untuk membantu Indonesia dalam hal konektivitas antar pulau, pembangunan kota, dan juga energi.⁴¹ Maka, melalui AIIB dan juga BRI sebagai bantuan dari Tiongkok, Indonesia dapat meningkatkan keamanan nasional serta persaingan geopolitik di negara-negara ASEAN, karena adanya koneksi yang kuat antarpulau di Indonesia.

Diplomasi Indonesia juga ditunjukkan melalui *Regional Comprehensive Economic Partnership* (RCEP) yang inisiatifnya dicetuskan oleh Indonesia pada tahun 2011, ketika Indonesia menjadi ketua ASEAN.⁴² Indonesia mengajak negara-negara ASEAN untuk membuat sebuah *free trade area* yang mengajak negara lainnya seperti Cina, Jepang, Korea Selatan, Australia, Selandia Baru dan India.⁴³ Kemudian, pada rezim Jokowi, setelah melewati negosiasi panjang, RCEP mencapai kesimpulan dan ditandatangani oleh seluruh negara yang terlibat pada 15 November 2020. Dalam siaran pers tahunan pada tanggal 8 Januari 2020, Retno Marsudi, selaku Menteri Luar Negeri mengatakan bahwa RCEP akan meningkatkan kerjasama dengan negara yang terlibat.⁴⁴ Sehingga dapat disimpulkan bahwa dengan terlibatnya Cina dalam kerangka kerja RCEP, maka Indonesia melalui ASEAN berharap ketegangan di LCS dapat berkurang dengan adanya kerjasama ekonomi.

Dalam *Joint Statement of the 8th Regional Comprehensive Economic Partnership (RCEP) Ministerial Meeting* tahun 2020, Menteri yang hadir termasuk Indonesia menyadari bahwa RCEP sangat penting di tengah keadaan yang sulit ini. Para menteri sepakat bahwa dengan penandatanganan RCEP, kepercayaan bisnis antarnegara akan semakin kuat, struktur ekonomi regional juga semakin stabil, dan rantai pasokan global dapat berjalan dengan baik. Dalam Joint Statement tersebut, Indonesia juga sepakat bahwa RCEP dapat membuat kawasan menjadi inklusif, sehingga perdagangan multilateral dapat berjalan dengan lancar. RCEP tidak hanya berguna di masa pandemi ini, tapi juga akan membantu saat pasca pandemi, yaitu dalam situasi

⁴⁰ “Badan Kebijakan Fiskal - Detail Berita.” 2015. Fiskal.kemenkeu.go.id. 2015.

<https://fiskal.kemenkeu.go.id/kajian/2015/06/30/130514285741890-ringkasan-eksekutif-kajian-posisi-indonesia-dalam-pembentukan-asian-infrastructure-investment-bank>.

⁴¹ “Presiden AIIB Tekankan Tiga Sektor Pembangunan Di Indonesia.” Antara News, 28 Juli, 2020.

<https://www.antarane.ws.com/berita/1638146/presiden-aiib-tekanan-tiga-sektor-pembangunan-di-indonesia>.

⁴² “Penandatanganan RCEP: Simbol Komitmen Perdamaian, Stabilitas, Dan Kesejahteraan Di Kawasan.” 2020. Presiden RI. 15 November, 2020. <https://www.presidentri.go.id/siaran-pers/penandatanganan-rcep-simbol-komitmen-perdamaian-stabilitas-dan-kesejahteraan-di-kawasan/>.

⁴³ Gultom, Donna. 2020. “RCEP: The Opportunity for Indonesia and Steps of Its Implementation, an Insider’s Perspective.” CIPS. 8 Desember, 2020. <https://www.cips-indonesia.org/post/rcep-the-opportunity-for-indonesia-and-steps-of-its-implementation-an-insider-s-perspective>.

⁴⁴ “Asean Foreign Ministers Retreat Indonesia Dukung Penuh Keketuaan Vietnam Tahun 2020 | Portal Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia.” 2020. Kemlu.go.id. 17 Januari, 2020. <https://kemu.go.id/portal/i/read/969/berita/asean-foreign-ministers-retreat-indonesia-dukung-penuh-keketuaan-vietnam-tahun-2020>.

pemulihan dan pertumbuhan ekonomi regional serta global.⁴⁵ Maka, dengan adanya RCEP, para menteri sudah menyetujui bahwa negara-negara ASEAN harus bersatu, terutama dalam sulitnya masa pandemi ini, dan kemudian saling membantu untuk menciptakan politik yang stabil.

Peran tiga keputusan ini yaitu AOIP, BRI, dan RCEP membantu Indonesia dalam mencapai apa yang menjadi tujuan Indonesia. AOIP telah membuka kesempatan untuk Indonesia dapat memanfaatkan posisi yang memiliki kekuatan besar di Asia Tenggara dan sebagai perancang AOIP untuk mempergunakan keputusan ini sebagai strategi untuk mencegah adanya konflik.⁴⁶ Kemudian, BRI digunakan Indonesia untuk menerima kolaborasi yang diberikan China kepada Indonesia berupa bantuan pembangunan infrastruktur darat dan juga laut. Pengaruh geopolitik dalam mempengaruhi kepentingan nasional juga ditunjukkan dalam RCEP yaitu dalam membangun kembali perekonomian negara yang terdampak dari pandemi COVID-19. RCEP juga menjadi motivasi negara yang terlibat bahwa perekonomian akan terus berkembang.⁴⁷ Ketiga hal ini menjadi sejalan dengan teori yang digunakan dalam penelitian ini yaitu kepentingan nasional karena AOIP, BRI, dan RCEP telah menjadi instrumen Indonesia sebagai landasan dari perilaku politik negara, terutama dalam kasus ini secara geopolitik.

c. Pemanfaatan Pemenuhan Kepentingan Nasional Indonesia melalui Keterkaitan Geopolitik untuk Praktik Diplomasi Preventif Indonesia terhadap Eskalasi Konflik LCS

Berkaca pada ketiga kerangka kerja multilateral yang dicetuskan oleh Indonesia melalui *ASEAN Outlook on Indo-Pacific* (AOIP), *Belt Road Initiative* (BRI), dan *Regional Comprehensive Economic Partnership* (RCEP), masing-masing kerangka kerja yang disebutkan telah dirancang agar menggunakan mekanisme ‘*ASEAN-led*’ atau dipimpin oleh ASEAN untuk melangsungkan kegiatannya.⁴⁸ Hal ini dilakukan dengan tujuan untuk mewujudkan sentralitas ASEAN dan agendanya dalam berdiplomasi demi meningkatkan relasi dengan negara-negara lain melalui kerjasama, terutama dalam bidang ekonomi. Sehingga, dapat dianalisa juga bahwa Indonesia dan negara-negara anggota ASEAN lainnya menggunakan strategi ini sebagai metode diplomasi preventif dalam menangani konflik di Laut Cina Selatan. Oleh sebab itu, pembahasan selanjutnya akan memperlihatkan bagaimana Indonesia berupaya untuk menciptakan diplomasi preventif melalui kerjasama dalam ketiga kerangka kerja multilateral yang disebutkan.

Pertama, ambisi Indonesia terlihat dalam agenda *ASEAN Outlook on Indo-Pacific* (AOIP) yang menegaskan bahwa AOIP diharapkan dapat mewisuda negosiasi untuk menangani konflik maritim yang berpotensi untuk menjadi perang terbuka. Dilansir dari pasal 13 dan 14 dari dokumen resmi AOIP yang diunggah oleh situs resmi ASEAN, “*In order to realize the key elements of ASEAN Outlook on the Indo-Pacific, ASEAN will undertake cooperation in a broad range of areas, including: The existing and arising geopolitical challenges facing countries in the region also revolve around maritime issues such as unresolved maritime disputes that have the*

⁴⁵ “Joint Media Statement of the 8 Th Regional Comprehensive Economic Partnership (RCEP) Ministerial Meeting.” 2020. <https://rcepsec.org/wp-content/uploads/2020/11/RCEP-MM-8-JMS.pdf>.

⁴⁶ *Bangkok Post*. 2019. “Decoding the Indo-Pacific Outlook,” 28 Juni, 2019. <https://www.bangkokpost.com/opinion/opinion/1703344/decoding-the-indo-pacific-outlook>.

⁴⁷ Gultom, Donna. 2020. “RCEP: The Opportunity for Indonesia and Steps of Its Implementation, an Insider’s Perspective.” CIPS. 8 Desember, 2020. <https://www.cips-indonesia.org/post/rcep-the-opportunity-for-indonesia-and-steps-of-its-implementation-an-insider-s-perspective>.

⁴⁸ ASEAN, “ASEAN Outlook on the Indo-Pacific,” ASEAN.org, 22 Juni, 2019, https://asean.org/storage/2019/06/ASEAN-Outlook-on-the-Indo-Pacific_FINAL_22062019.pdf.

*potential for open conflict ...*⁴⁹ Sementara dalam pasal 15, AOIP juga mengakui kerjasama maritim akan dilakukan dibawah undang-undang UNCLOS 1982 sebagai acuan penyelesaian konflik, peningkatan kapasitas, dan meningkatkan keamanan maritim. Dalam pernyataan Presiden Joko Widodo pada 34th ASEAN Summit di Thailand, hakikatnya AOIP terbentuk untuk beradaptasi terhadap pengaruh Perang Dagang AS-Tiongkok; namun secara bersamaan juga menggunakan momentum untuk mengembalikan sentralitas kawasan Asia Tenggara dalam berbagai bidang.⁵⁰ Hal ini membuktikan bahwa Indonesia yakin dapat membawa lebih dari agenda ekonomi bersama negara-negara di Indo-Pacific, termasuk terhadap Tiongkok dan konflik Laut Cina Selatan sebagai bentuk diplomasi preventif.

Kedua, pendirian yang paling mendasar dari Tiongkok adalah menjaga kepentingan nasional dan memelihara perdamaian dan stabilitas di kawasan. Tiongkok sangat mengedepankan kepentingan nasional sebelum akhirnya *Belt and Road Initiative* (BRI) terbentuk.⁵¹ Oleh karena itu, Tiongkok menggunakan kerangka kerja BRI sebagai kunci dari membangun hubungan dengan Indonesia dan ASEAN dalam kerjasama ekonomi dan infrastruktur. Di dalam kerangka kerja BRI, terdapat dua kerangka bagian yang membawahnya, yaitu *Silk Road Economic Belt* (SREB) yang berfokus kepada kerjasama kawasan Eurasia dan *Maritime Silk Road* (MSR) yang berfokus pada kerjasama kawasan maritim khususnya Asia Tenggara.⁵² Alhasil pada tahun 2013, ASEAN dan Tiongkok berhasil melakukan konsultasi mengenai kode etik atau *Code of Conduct* sebagai respon terhadap konflik Laut Cina Selatan.⁵³ Hal ini membuktikan bahwa dengan mentalitas baru Tiongkok, Indonesia dan anggota negara ASEAN lainnya juga dapat memanfaatkan hal ini sebagai peluang untuk melakukan tindakan diplomasi preventif.

Ketiga, dalam kerangka kerja *Regional Comprehensive Economic Partnership* (RCEP), Indonesia juga ditunjuk sebagai *country coordinator* dan *Chair of Trade Negotiating Committee* (TNC) untuk memimpin strategi kerjasama dari 10 anggota RCEP.⁵⁴ Selama tahun 2012 hingga akhirnya disahkan pada tahun 2019, Indonesia menyusun prinsip dan pedoman kerjasama yang tidak hanya meliputi bidang ekonomi, tetapi juga kerjasama maritim.⁵⁵ Hal ini membuat penyelesaian konflik maritim menjadi salah satu dari agenda yang harus diselesaikan oleh RCEP. Dalam dokumen resmi RCEP yang berisi 9 prinsip acuan dan objektif untuk bernegosiasi, terdapat juga agenda yang meliputi prinsip acuan perdagangan barang dan jasa, investasi, kerjasama ekonomi dan teknis, hak milik intelektual, kompetisi, dan penyelesaian konflik.⁵⁶ Sehingga, dapat dikatakan bahwa RCEP tidak hanya bersifat sebagai kerangka kerja untuk meningkatkan kawasan perdagangan bebas di Asia Tenggara, tetapi juga sebagai upaya diplomasi preventif melalui pendekatan kerjasama dengan Tiongkok untuk meredam ketegangan geopolitik.

⁴⁹ Idem.

⁵⁰ Dian Septiari, "ASEAN Leaders Adopt Indonesia-Led Indo-Pacific Outlook," The Jakarta Post, 23 Juni, 2019, <https://www.thejakartapost.com/seasia/2019/06/23/asean-leaders-adopt-indonesia-led-indo-pacific-outlook.html>.

⁵¹ Chenchen Chen and Le Yao, "Belt and Road Initiative and Possible Impacts on the South China Sea Issue," *International Relations and Diplomacy* 7, no. 5 (2 Desember, 2017); pp. 709-716, <https://doi.org/10.17265/2328-2134/2017.12.002>.

⁵² Andrew Chatzky and James McBride, "Belt and Road Initiative," Council on Foreign Relations, 28 Januari, 2020, <https://www.cfr.org/background/chinas-massive-belt-and-road-initiative>.

⁵³ *Ibid.*

⁵⁴ Association of South East Asian Nations (ASEAN), "Guiding Principles and Objectives for Negotiating the Regional Comprehensive Economic Partnership" (20 November, 2012), https://www.mofa.go.jp/mofaj/press/release/24/11/pdfs/20121120_03_03.pdf.

⁵⁵ Idem.

⁵⁶ *Ibid.*

Kesimpulan

Dengan melihat hubungan kerjasama yang dilakukan Indonesia untuk memenuhi kepentingan nasionalnya dalam bentuk diplomasi preventif, dapat dilihat motivasi Indonesia untuk meminimalisir keberadaan Tiongkok di LCS. Motivasi tersebut dapat dilihat dari dua aspek yaitu keamanan maritim dan ekonomi. Dalam aspek keamanan maritim, Indonesia berupaya mengurangi ketegangan konflik di LCS agar tidak terjadi perang terbuka. Indonesia dalam hal ini berperan cukup signifikan mengingat posisinya sebagai pemimpin *de facto* di ASEAN. Dengan posisinya, Indonesia merasa penting untuk menjaga keamanan maritim tidak hanya pada wilayahnya namun juga di kawasan Asia Tenggara. Lalu dalam aspek ekonomi, Indonesia berupaya mengembalikan sentralitas ASEAN dalam mengelola kegiatan ekonomi di kawasan Asia Tenggara. Mengingat bahwa kekuatan pertahanan Indonesia tidak sekuat Tiongkok, Indonesia harus berhati-hati dalam bersikap menghadapi keagresifan Tiongkok di LCS. Berkaitan dengan hal tersebut Indonesia melakukan diplomasi preventif melalui kerangka kerja sama yang secara langsung juga memiliki implikasi geopolitik positif dan dapat mempererat relasi antar negara atas dasar prinsip ASEAN, menjadikan Indonesia sebagai panutan di kawasan.

Untuk mencapai dan menyukseskan diplomasi preventif ini, rekomendasi yang dapat ditawarkan adalah Indonesia menjadi aktor yang dapat diandalkan dalam negosiasi konflik regional. Selain itu Indonesia juga dapat mengembangkan proyek-proyek infrastruktur melalui investasi Tiongkok sekaligus mempererat relasi kedua negara. Namun, dalam upaya menyelesaikan konflik tersebut, Indonesia berpotensi menghadapi ancaman yaitu dimanipulasi oleh negara *great power* seperti Tiongkok mengingat populasi dan sumber daya Indonesia yang terbuka akan kemungkinan eksploitasi dalam kerjasama ekonomi seperti RCEP untuk menguntungkan Tiongkok.

Diplomasi preventif yang dilakukan oleh Indonesia dapat dikatakan berhasil melihat pada tidak meningkatnya tensi di LCS akibat keberhasilan dari kerja sama yang dilakukan secara bilateral maupun multilateral. Untuk menjawab hal tersebut, penelitian ini berargumen bahwa menjaga teritori serta kepentingan ekonomi Indonesia berperan penting dalam mendorong keikutsertaan Indonesia dalam 3 kerangka kerja sama yang dipilih yaitu *ASEAN Outlook on Indo-Pacific (AOIP)*, *Belt Road Initiative (BRI)*, dan *Regional Comprehensive Economic Partnership (RCEP)* dimana kerjasama ini digunakan Indonesia untuk meredam tensi sekaligus mencapai kepentingan nasionalnya.

Daftar Pustaka

- Asean Foreign Ministers Retreat Indonesia Dukung Penuh Keketuaan Vietnam Tahun 2020*. | Portal Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia. (n.d.). Kemlu.go.id. <https://kemlu.go.id/portal/i/read/969/berita/asean-foreign-ministers-retreat-indonesia-dukung-penuh-keketuaan-vietnam-tahun-2020>. [Diakses pada 2 Juli 2021]
- Badan Kebijakan Fiskal - Detail Berita*. (n.d.). Fiskal.kemenkeu.go.id. <https://fiskal.kemenkeu.go.id/kajian/2015/06/30/130514285741890-ringkasan-eksekutif-kajian-posisi-indonesia-dalam-pembentukan-asian-infrastructure-investment-bank>. [Diakses pada 2 Juli 2021]
- Bull, H. (1979). *The anarchial society : a study of order in world politics*. Macmillan Press.
- Burchill, S. (2005). *The national interest in international relations theory*. Palgrave Macmillan.

- CNN Indonesia. (18 Juni 2020). *RI Kirim Nota Verbal Tolak Klaim China di LCS ke PBB*. Internasional. <https://www.cnnindonesia.com/internasional/20200617202138-106-514497/ri-kirim-nota-verbal-tolak-klaim-china-di-lcs-ke-pbb>
- Cobus, P. (29 Desember 2016). *Laut China Selatan Konflik dan Diplomasi di Laut*. Voanews.com. <https://projects.voanews.com/south-china-sea/indonesian/>
- Decoding the Indo-Pacific outlook. (n.d.). *Bangkok Post*. <https://www.bangkokpost.com/opinion/opinion/1703344/decoding-the-indo-pacific-outlook>. [Diakses pada 30 Juni 2021]
- Della-Giacoma, J. (2011). Preventive Diplomacy in Southeast Asia: Redefining the ASEAN Way. diakses pada 6 Juli, 2021, dari website JSTOR: <http://www.jstor.com/stable/resrep09602.6>
- Dian Anggraini, S., Kusumawardhana, I., & Ramadhan, I. (2018). The Implication of Indonesia's IUU Fishing Policy in Natuna Territorial Waters towards South China Sea Geopolitics. *Jurnal Hubungan Internasional*, 7(2). <https://doi.org/10.18196/hi.72130>
- Gindarsah, I. (2016). Strategic Hedging in Indonesia's Defense Diplomacy. *Defense & Security Analysis*, 32(4), 336–353. <https://doi.org/10.1080/14751798.2016.1233695>
- Gultom, D. (8 Desember 2020). *RCEP: The Opportunity for Indonesia and Steps of Its Implementation, An Insider's Perspective*. CIPS. <https://www.cips-indonesia.org/post/rcep-the-opportunity-for-indonesia-and-steps-of-its-implementation-an-insider-s-perspective>
- Hammarskjöld, D. (2011). Preventive Diplomacy: Delivering Results. In *Report of the Secretary-General*. <https://www.un.org/undpa/sites/www.un.org.undpa/files/SG%20Report%20on%20Preventive%20Diplomacy.pdf>
- Indonesian high-speed rail serves as BRI enlightener - Global Times*. (n.d.). [www.globaltimes.cn](http://www.globaltimes.cn/content/1159232.shtml). <https://www.globaltimes.cn/content/1159232.shtml>
- Joint Media Statement of the 8 th Regional Comprehensive Economic Partnership (RCEP) Ministerial Meeting*. (2020). <https://rcepsec.org/wp-content/uploads/2020/11/RCEP-MM-8-JMS.pdf>
- Kementerian Keuangan. (n.d.). *Penjelasan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 1999*. [Jdih.kemenkeu.go.id](http://jdih.kemenkeu.go.id). <https://jdih.kemenkeu.go.id/fulltext/1999/37TAHUN1999UUPenjel.htm>
- Kementerian Pertahanan Republik Indonesia. (n.d.). *Kementerian Pertahanan Republik Indonesia*. www.kemhan.go.id. <https://www.kemhan.go.id/2012/05/10/reformasi-pertahanan-dan-kapabilitas-pertahanan-negara-yang-murah-meriah.html>. [Diakses pada 30 Juni 2021]
- Kontan. (21 Januari 2021). *Kekuatan militer ASEAN: Indonesia nomor 1, Vietnam peringkat 2*. kontan.co.id. <https://nasional.kontan.co.id/news/kekuatan-militer-asean-indonesia-nomor-1-vietnam-peringkat-2>
- Lai, H. (4 Oktober 2021). *Indonesia: The Belt and Road Initiative and relations with China*. Asia Dialogue. <https://theasiadialogue.com/2019/10/04/belt-and-road-initiative-in-indonesia-and-relations-with-china/>
- Mata Mata Politik Editorial. (27 Juni 2020). *Netral atau Tegas: Mengukur Kepentingan Indonesia di Laut China Selatan*. Berita Dunia Internasional Dan Berita Politik Indonesia Terbaru Hari Ini. <https://www.matamatapolitik.com/netral-atau-tegas-mengukur-kepentingan-indonesia-di-laut-china-selatan-analisis/>
- Menko Luhut: *Indonesia Alokasikan Empat Koridor Pada Proyek BRI*. (n.d.). [Maritim.go.id](http://maritim.go.id). <https://maritim.go.id/menko-luhut-indonesia-alokasikan-empat-koridor-pada-proyek-bri/>. [Diakses pada 30 Juni 2021]
- Penandatanganan RCEP: Simbol Komitmen Perdamaian, Stabilitas, dan Kesejahteraan di Kawasan*. (15 November 2020). Presiden RI. <https://www.presidentri.go.id/siaran-pers/penandatanganan-rcep-simbol-komitmen-perdamaian-stabilitas-dan-kesejahteraan-di-kawasan/>

- Presiden AIBB tekankan tiga sektor pembangunan di Indonesia.* (28 Juli 2020). Antara News. <https://www.antaranews.com/berita/1638146/presiden-aiib-tekankan-tiga-sektor-pembangunan-di-indonesia>
- Ralf Emmers, & See Seng Tan. (2009). *The ASEAN Regional Forum and Preventive Diplomacy : a Failure in Practice*. S. Rajaratnam School Of International Studies, Nanyang Technological University.
- Rosenau, J. N. (1964). National Interest. In D. L. Sills (Ed.), *International Encyclopedia of the Social sciences* (pp. 34–40). Collier Macmillan.
- Sato, K. (2013). The Rise of China's Impact on ASEAN Conference Diplomacy: a Study of Conflict in the South China Sea. *Journal of Contemporary East Asia Studies*, 2(2), 95–110. <https://doi.org/10.1080/24761028.2013.11869064>
- Schweller, R. L. (2009). *Great Powers and Geopolitical Change*. By Jakub J. Grygiel. Baltimore: The Johns Hopkins University Press, 2006. 258p. \$47.00. *Perspectives on Politics*, 7(1), 224–225. <https://doi.org/10.1017/s1537592709090689>
- Sekretariat Nasional ASEAN - Indonesia. (n.d.). *Sekretariat Nasional ASEAN – Indonesia*. Setnas-Asean.id. <http://setnas-asean.id/peranan-indonesia>
- Sekretariat Negara. (n.d.). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 1999*. https://ktn.setneg.go.id/pdf/TA/PP_37_1999.pdf
- Sokla, C. (2019). ASEAN's Preventive Diplomacy: What Roles for ASEAN in the South China Sea and the Rakhine State Issues? *Open Journal of Political Science*, 09(02), 434–457. <https://doi.org/10.4236/ojps.2019.92024>
- World Economic Forum. (2015). *Global Agenda Councils Geo-economics Seven Challenges to Globalization*. http://www3.weforum.org/docs/WEF_Geo-economics_7_Challenges_Globalization_2015_report.pdf
- Yuliantino Situmorang. (2014, July 16). *Tiongkok Hentikan Pengeboran Minyak di Kawasan Sengketa*. Beritasatu.com. <https://www.beritasatu.com/dunia/197030/tiongkok-hentikan-engeboran-minyak-di-kawasan-sengketa>
- Yuzawa, T. (2006). The Evolution of Preventive Diplomacy in the ASEAN Regional Forum: Problems and Prospects. *Asian Survey*, 46(5), 785–804. <https://doi.org/10.1525/as.2006.46.5.785>